



RENJA

RENCANA KERJA
2025

**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	LatarBelakang	1
1.2	LandasanHukum	1
1.3	MaksuddanTujuan	3
1.4	SistematikaPenulisan	3
BAB. II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	5
2.1	EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD tahunlaludanCapaianRenstra SKPD	5
2.2	AnalisisKinerjaPelayanan	23
2.3	Isu – IsuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi SKPD	43
2.4	Review TerhadapRancanganAwal RKPD	45
2.5	PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat	58
BAB.III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	60
3.1	TelaahanTerhadapKebijakanNasionaldanProvinsi	60
3.2	TujuandanSasaranRenja SKPD	61
3.3	Program danKegiatan	61
BAB. IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64
BAB. V	PENUTUP	72

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa dalam melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan di Kab. Sumbawa. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) ini lahir dari perencanaan melalui proses teknokratik dan proses partisipatif (musrenbang), dengan demikian diharapkan hasilnya mampu meningkatkan pelayanan publik di bidang perhubungan.

Kami menyadari, masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam Rencana Kerja (Renja) ini, untuk itu masukan-masukan positif sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat, terutama sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2025 yang akan datang.

Sumbawa Besar, Januari 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sumbawa



Drs. ZAINAL ABIDIN

NIP. 19640213 199003 1 008

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 adalah rencana kerja tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (1 Tahun), berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana kerja tahunan merupakan hirarki dari rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang berisi rencana program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

Rencana Kinerja (RENJA) berisi program dan kegiatan yang disusun melalui proses perencanaan teknokratik dan proses perencanaan partisipatif. Perencanaan teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan oleh bidang teknis di Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa berdasarkan kajian-kajian teknis dan skala prioritas, sedangkan proses perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang mana aspirasi masyarakat diserap melalui musrenbang di tingkat desa/kecamatan. Dokumen Renja merupakan dasar penyusunan anggaran tahunan dimana pada tahap akhir pelaksanaannya akan dilakukan pengukuran kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun anggaran, yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 disusun melalui proses perencanaan teknokratik dan partisipatif yang secara garis besar berisi hal-hal berikut :

1. Rumusan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas yang digali dari isu-isu strategis dan permasalahan mendasar dengan memperhitungkan potensi dan kemampuan keuangan daerah.
2. Pedoman/landasan bagi aparatur untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
3. Uraian target kinerja terhadap program dan kegiatan yang menjadi pedoman dan tolak ukur dalam penilaian akuntabilitas kerja.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI. Pendahuluan

- 1.1 LatarBelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BabII. Hasil Evaluasi Rencana Kerja

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 ReviewTerhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BabIII. Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

BabIV. Penutup

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 (n-3)

Rencana kerja Tahun 2021 (n-3) disusun mengacu pada rencana strategis 2021-2026, rencana kerja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA, yang berisi program/kegiatan untuk tahun anggaran 2022. Relalisasi rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan RKA/DPA Tahun 2021 capaiannya kurang dari 100% dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena terdapat obyek belanja yang tidak direalisasikan sebagai akibat dari adanya refofusing anggaran dampak dari adanya Covid-19.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 (n-2)

Rencana kerja Tahun 2022 (n-2) berisi program dan kegiatan prioritas serta program dan kegiatan yang bersifat rutin dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Realisasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022 dapat diselesaikan 100% dengan indikasi capaian target program dan kegiatan sebesar 100%.

2.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 (n-1)

Rencana kerja Tahun 2023 (n-1) merupakan rencana kerja tahun berjalan berisi program dan kegiatan prioritas serta program dan kegiatan yang bersifat rutin dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sampai dengan saat ini pelaksanaan APBD Kab. Sumbawa Tahun 2023 masih berjalan, realisasi rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan RKA/DPA Tahun 2023 capaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena masih adanya proses refocusing anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang masih berjalan hingga saat ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Urusan Wajib									
		Bidang Urusan Perhubungan									
	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah								
	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	Dok	1	1	1	1	1	1	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	dok	1	1	1	1	1	1	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen DPA-SKPD								
	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	100
	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	2	2	1	1	2	2	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Lap	1	1	1	1	1	1	100
	1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD								
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	43	43	43	43	51	51	100
	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	3	3	1	1	3	3	100
	1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	dok	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Akuntansi SKPD								
	1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	N/A	N/A	1	1	100
	1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	lap	1	1	1	1	3	3	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Triwulanan / Semesteran SKPD								
	1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100
	1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD								
	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan tahun n	Paket	4	4	4	4	4	4	100
	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	2	2	1	1	2	2	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang diadakan tahun n								
	1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun tahun n	Dok	2	2	2	2	2	2	100
	1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun tahun n	Lap	24	24	24	24	24	24	100
	1.3.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis yang disusun tahun n	Dok	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD								
	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100
	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	Lap	4	4	4	4	4	4	100
	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	12	12	12	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	3	3	3	3	3	3	100
	1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD								
	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	5	5	10	10	100

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	1	1	4	4	100
	2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan LLJA								
	2.1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan								
	2.1.1	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	22	22	1	1	25	70	280

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1.2	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	100
	2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia								
	2.2.1	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	100
	2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan dan								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Parkir	pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan								
	2.3.1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok	1	1	1	1	1	1	100
	2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			berkala								
	2.4.1	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	3	3	1	1	1	1	100
	2.4.2	- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	5464	783	5514	3171	5564	3683	66,19
	2.5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Angkutan yang disusun								
	2.5.1	- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Lap	1	1	20	10	1	1	100
	2.6	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah yang								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ditetapkan								
	2.6.1	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok	1	1	1	1	1	-	-
	2.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.7.1	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kotadalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	laporan	342	54	342	131	342	24	7,01
	2.8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan								

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021 (n-3)	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	penumpang umum								
	2.8.1	- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	1	1	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, menetapkan 2 (dua) Indikator Sasaran yang diperjanjikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Capaian kinerja sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama yaitu dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja Utama, Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa. Kinerja pelayanan digambarkan melalui ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen dimana realisasi Indikator Kinerja Utama merupakan wujud kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	74,00 (BB)	70,05 (BB)	94,66
Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten	%	85,65	87,1	101,69

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2023 secara rinci dianalisis

menurut indikator kinerja masing-masing sasaran strategis berikut ini. Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan tolok ukurnya adalah :

1. IKU-1 (Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas Perhubungan)

Indikator Sasaran Strategis ini masuk dalam Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Adapun nomenklatur tujuan dan indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator sasaran strategis serta program prioritas dan indicator *outcome* dari setiap program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang mendukung upaya pencapaian target setiap sasaran strategis, disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 *Cascading* Kinerja Indikator Sasaran Strategis I Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Tujuan (T)	Sasaran Strategis (SS)	Program (P)	Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)	PD/Unit PD Pj.
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi		1 Persentase Peningkatan Nilai RB	Kepala Dinas Perhubungan
	1 Meningkatkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan		1 Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Sekretaris
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Sekretaris

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah

“Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas Perhubungan”, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi”**. Tujuan ini memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu **“Persentase Peningkatan Nilai RB”**. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun `2021 tentang Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dihitung dengan membandingkan realisasi dengan target indikator sasaran. Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dihitung dengan formulasi pengukuran: Penilaian Inspektorat.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya

dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk :

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berdasarkan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja di atas, diasumsikan bahwa capaian kinerja kategori nilai SAKIP Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 sebesar 70,12% (**BB**). Tahun 2022 capaian nilai kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 73,17% (**BB**) (sesuai dengan LHE Inspektorat Kab. Sumbawa Nomor: 700.R/114/Itkab/2022). Sedangkan Tahun 2023 hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menunjukkan nilai sebesar 70,05% dengan predikat **BB (Sangat Baik)** berdasarkan LHE Inspektorat Nomor: 700.1.2.1/98/AKIP/Itkab/2023 tanggal 18 Agustus 2023. Nilai tersebut merupakan hasil pembulatan angka secara otomatis pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Hasil evaluasi Tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat

perubahan bobot komponen dan sub-komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.4
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Tahun 2021 - 2023

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (huruf)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas Perhubungan	BB	BB	BB

Sumber : Penilaian Inspektorat (LHE AKIP)

2. IKU-2 (Peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten)

Indikator Sasaran Strategis ini masuk dalam Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Adapun nomenklatur tujuan dan indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator sasaran strategis serta program prioritas dan indicator *outcome* dari setiap program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang mendukung upaya pencapaian target setiap sasaran strategis, disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Cascading Kinerja Indikator Sasaran Strategis II Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Tujuan (T)	Sasaran Strategis (SS)	Program (P)	Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)	PD/Unit PD Pj.
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan	1	Peningkatan infrastruktur dalam kondisi baik	Kepala Dinas Perhubungan

			1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	1	Peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten	Sekretaris
				1	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kepala Bidang Prasarana Kepala Bidang LLAJ
						2	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Kepala Bidang LLAJ Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
				2	Program Pengelolaan Pelayaran	1	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana Pelayaran Kepala Bidang Prasarana Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
						2	Persentase Capaian Kinerja penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran Kepala Bidang Prasarana Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
						3	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran Kepala Bidang Prasarana Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah **“Peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten”**, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan”**, dengan indikator yaitu **“Peningkatan infrastruktur dalam kondisi baik”**.

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dihitung dengan membandingkan realisasi dengan target indikator sasaran. Persentase Capaian Kinerja **Peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten** dihitung berdasarkan jumlah angkutan jalan dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berbanding kebutuhan trayek dan kebutuhan lintas penyeberangan, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut :

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

Keterangan :

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/ kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas:

- a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Tabel 2.6
Rasio Konektivitas Kabupaten
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rumus/ Persamaan	Capaian kinerja	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rasio Konektivitas Kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>IK1=(113x1)/121 = 0,93</p> <p>IK2=(11x0,8)/12 = 0,73</p> <p>Rasio Konektivitas Kabupaten =</p> <p>(0,93 x 0,7) + (0,73 x 0,3)= 0.87 (87.10)</p>	<p>Rasio Konektivitas Kabupaten =</p> <p>(0,93 x 0,7) + (0,73 x 0,3)</p> <p>= 0.87</p> <p>(87.10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani di Kabupaten Sumbawa sebanyak 113 trayek - Jumlah kebutuhan trayek di Kabupaten Sumbawa sebanyak 121 trayek - Jumlah lintas penyeberangan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 11 lintas - Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 12 lintas

Tabel 2.7
Rasio Konektivitas Kabupaten
Tahun 2021 - 2023

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)		
		2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten	87,10	87,10	87,10

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa

Berdasarkan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja di atas, dilaporkan bahwa Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 sebesar 87,10% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,65% sehingga capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 capaiannya lebih dari 100% yaitu sebesar 101,69%. Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 masih sama dengan Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021 dan Tahun 2022, hal ini disebabkan karena selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak ada penambahan pada Jumlah trayek yang dilayani di Kabupaten Sumbawa demikian juga untuk jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten Sumbawa, belum ada penambahan karena pada Tahun 2022 hanya dilakukan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas. Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2023 digambarkan sebagai berikut :

1. Trayek yang dilayani di Kabupaten Sumbawa

Transportasi angkutan umum (darat) mempunyai peranan penting dalam pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 24 Kecamatan dalam rangka menjamin terselenggaranya konektivitas. Konektivitas Jalan Kabupaten ditentukan oleh jumlah trayek yang dilayani dan jumlah kebutuhan trayek di Kabupaten Sumbawa pada kurun waktu tertentu. Jumlah dan kebutuhan trayek ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Sumbawa.

Di Kabupaten Sumbawa terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) jaringan trayek angkutan pedesaan yang dilalui oleh angkutan pedesaan kategori Bus, Microbus, dan PickUp, namun beberapa jarak tempuh terjauh hanya dilalui oleh bus sehingga jumlah trayek tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jaringan trayek seperti angkutan bus yang sedianya melayani rute Sumbawa-Empang juga melayani penumpang Sumbawa-Lape. ***Besaran tarif angkutan***

pedesaan berdasarkan SK Bupati Sumbawa nomor 574 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dalam Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

**Tabel 2.8
Trayek dan Tarif Dasar Angkutan Pedesaan
pada Kondisi Jalan Normal**

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR LAMA (RP)	TARIF DASAR BARU (Rp)	JASA RAHARJA	TOTAL TARIF LAMA PER JARINGAN TRAYEK	
						TARIF	PEM BULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sumbawa Besar-Serading	11	272	253	100	2.883	2.900
2	Sumbawa Besar-Lopok	22	272	253	100	5.666	5.700
3	Sumbawa Besar-Langam	25	272	253	100	6.425	6.500
4	Sumbawa Besar-Lape	30	272	253	100	7.690	7.700
5	Sumbawa Besar- Bina Teruntum	37	272	253	100	9.461	9.500
6	Sumbawa Besar-Pemasar	39	272	253	100	9.967	10.000
7	Sumbawa Besar- Simu	41,5	272	253	100	10.599	10.600
8	Sumbawa Besar-Maronge	43	272	253	100	10.979	11.000
9	Sumbawa Besar- Muer	54	272	253	100	13.762	13.800
10	Sumbawa Besar-Jompong	56	272	253	100	14.268	14.300
11	Sumbawa Besar- Sejari	59,5	272	253	100	16.284	16.300
12	Sumbawa Besar-Pelampang	62	272	253	100	15.786	15.800

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR LAMA (RP)	TARIF DASAR BARU (Rp)	JASA RAHARJA	TOTAL TARIF LAMA PER JARINGAN TRAYEK	
						TARIF	PEM BULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Sumbawa Besar- Teluk Santong	78	272	253	100	19.834	19.900
14	Sumbawa Besar- Gapit	86	272	253	100	21.858	21.900
15	Sumbawa Besar- Empang	93	272	253	100	23.629	23.700
16	Sumbawa Besar- Kanar	17	272	253	100	4.401	4.500
17	Sumbawa Besar- Luk	23	272	253	100	5.919	6.000
18	Sumbawa Besar- Rhee	34	272	253	100	8.702	8.800
19	Sumbawa Besar- Utan	47	272	253	100	11.991	12.000
20	Sumbawa Besar- Bina Marga	52	272	253	100	13.256	13.000
21	Sumbawa Besar- Pernang	59	272	253	100	15.027	15.100
22	Sumbawa Besar- Kramat	62	272	253	100	15.786	15.800
23	Sumbawa Besar- Alas	69	272	253	100	17.557	17.600
24	Sumbawa Besar- Lab. Mapin	76	272	253	100	19.328	19.400
25	Sumbawa Besar- Kereke	6	272	253	100	1.618	1.700
26	Sumbawa Besar- Selang	8	272	253	100	2.124	2.200
27	Sumbawa Besar- Boak	11	272	253	100	2.883	2.900
28	Sumbawa Besar- Pernek	17	272	253	100	4.401	4.500
29	Sumbawa Besar- Mokong	18,5	272	253	100	4.781	4.800

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR LAMA (RP)	TARIF DASAR BARU (Rp)	JASA RAHARJA	TOTAL TARIF LAMA PER JARINGAN TRAYEK	
						TARIF	PEM BULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Sumbawa Besar- Batu Bulan	14	272	253	100	3.642	3.700
31	Sumbawa Besar- Pelita	15	272	253	100	3.895	3.900
32	Sumbawa Besar- Sebasang Untir	18	272	253	100	4.654	4.700
33	Sumbawa Besar- Sebasang	21	272	253	100	5.413	5.500
34	Sumbawa Besar- Batu Tering	27	272	253	100	6.931	7.000
35	Sumbawa Besar- Lito	31	272	253	100	7.943	8.000
36	Sumbawa Besar- Semamung	21	272	253	100	5.413	5.500
37	Sumbawa Besar- Brang Rea	28,5	272	253	100	7.221	7.300
38	Sumbawa Besar- Lenanguar	42	272	253	100	10.726	10.800
39	Sumbawa Besar- Ledang	51	272	253	100	13.003	13.000
40	Sumbawa Besar- Lunyuk	93	272	253	100	23.629	23.700
41	Sumbawa Besar- Pungkit Tede	33	272	253	100	8.449	8.500
42	Sumbawa Besar-Lantung	41	272	253	100	10.473	10.500
43	Sumbawa Besar- Ropang	61	272	253	100	15.533	15.600
44	Sumbawa Besar- Moyo	11	272	253	100	2.883	2.900

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR LAMA (RP)	TARIF DASAR BARU (Rp)	JASA RAHARJA	TOTAL TARIF LAMA PER JARINGAN TRAYEK	
						TARIF	PEM BULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Sumbawa Besar- Kakiang	15	272	253	100	3.895	3.900
46	Sumbawa Besar- berare	13	272	253	100	3.389	3.400
47	Sumbawa Besar-Ngeru	17	272	253	100	4.401	4.500
48	Sumbawa Besar- Labuhan ijuk	26	272	253	100	6.678	6.700
49	Sumbawa Besar- Ai Bari	21	272	253	100	5.413	5.500
50	Sumbawa Besar- Penyaring	9	272	253	100	2.377	2.400
51	Sumbawa Besar- Batu Bangka	19	272	253	100	4.907	5.000
52	Sumbawa Besar- Prajak	19	272	253	100	4.907	5.000
53	Sumbawa Besar- Poto	13	272	253	100	3.389	3.400
54	Sumbawa Besar- Sebewe	9	272	253	100	2.377	2.400
55	Sumbawa Besar- Pelat	9	272	253	100	2.377	2.400
56	Sumbawa Besar- klungkung	14	272	253	100	3.642	3.700
57	Sumbawa Besar- Semongkat	17	272	253	100	4.401	4.500
58	Sumbawa Besar-Batu Dulang	28	272	253	100	7.184	7.200
59	Langam - lape	6	272	253	100	1.618	1.700
60	Langam - Lab. Kuris	10	272	253	100	2.630	2.700
61	Langam - lab.	13	272	253	100	3.389	3.400

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR LAMA (RP)	TARIF DASAR BARU (Rp)	JASA RAHARJA	TOTAL TARIF LAMA PER JARINGAN TRAYEK	
						TARIF	PEM BULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Teratak						
62	Langam - Lab.Sangoro	30	272	253	100	7.690	7.700
63	Langam - Berora	8	272	253	100	2.124	2.200
64	Langam - Maronge	27	272	253	100	6.931	7.000
65	Langam - Pungkit	8	272	253	100	2.124	2.200
66	Langam - Mama'	8	272	253	100	2.124	200
67	Plampang - Labangka I	10	272	253	100	2.630	2.700
68	Plampang - Labangka V	15	272	253	100	3.895	3.900
69	Plampang - Teluk Santong	16	272	253	100	4.148	4.200
70	Plampang - Muer	8	272	253	100	2.124	2.200
71	Plampang - Lab. Jontal	24	272	253	100	6.172	6.700
72	Empang – Ongko	8	272	253	100	2.124	2.200
73	Empang - Lab. Jambu	10	272	253	100	2.630	2.700
74	Empang – Pidang	24	272	253	100	6.172	6.200
75	Empang - Teluk Santong	26.5	272	253	100	6.805	6.800
76	Rhee – Alas	35	272	253	100	8.955	9.000
77	Utan – Alas	22	272	253	100	5.666	5.700
78	Alas - Mapin Rea	12	272	253	100	3.136	3.200
79	Alas - Lab. Mapin	7	272	253	100	1.871	1.900
80	Alas – Marente	5	272	253	100	1.365	1.400

Terdapat juga jaringan trayek angkutan perdesaan pada kondisi jalan/medan berat. Berada di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa dengan topografi berbukit-bukit, kondisi jalan berkelok-kelok, curam dan rawan longsor.

Tabel 2.9
**Trayek dan Tarif Dasar Angkutan Pedesaan
pada Kondisi Jalan medan Berat**

NO	JARINGAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF PER JARINGAN TRAYEK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sumbawa Besar-Punik	43	25.765
2	Sumbawa Besar-Pusuk	53	45.088
3	Sumbawa Besar-Tepal	55	45.088
4	Sumbawa Besar-Musuk	59	51.529
5	Sumbawa Besar-Tangkampulit	61	51.505
6	Sumbawa Besar-Baturotok	67	64.194
7	Semongkat-Tepal	38	35.426
8	Batu Dulang-Tepal	27	33.494
9	Batu Dulang-Batu Rotok	39	59.903
10	Sumbawa Besar-Kaduk	78	90.176
11	Sumbawa Besar-Teladan	51	51.529
12	Sumbawa Besar-Senawang	55	51.529
13	Sumbawa Besar-Harapan jaya	57	51.529
14	Sumbawa Besar-Sebeok	63	51.529
15	Sumbawa Besar-Pelita	70	51.529
16	Sumbawa Besar- Kelawis	66	51.529
17	Sumbawa Besar- Lantung	41	12.882
18	Sumbawa Besar-Ropang	64	38.647
19	Sumbawa Besar-Baturotok	77	77.294

Terdapat wilayah-wilayah tertentu, kebutuhan trayeknya dilayani menggunakan angkutan perintis untuk menumbuhkan minat investasi disektor transportasi, sehingga kedepan trayek-trayek dimaksud dapat

terlayani secara bersaing. Beberapa trayek dimaksud dilayani oleh Bus Damri dan juga oleh kendaraan milik BumDes.

Tabel 2.10

Trayek Damri yang terlayani dan Trayek yang terlayani oleh Bumdes

NO	JARINGAN TRAYEK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Mataram-Labangka	DAMRI
2	Mataram-Empang	DAMRI
3	Sumbawa-Sampar Goal	DAMRI
4	Mataram-Lunyuk	DAMRI
5	Mataram-Orong Telu	DAMRI
6	Mataram-Sumbawa-Mata	DAMRI
7	Mataram-Ropang	DAMRI
8	Mataram-Moyo Hilir	DAMRI
9	Mataram-Sumbawa Besar-Ropang	DAMRI
10	Terminal Sumer Payung-Sampar Goal I (usulan baru)	DAMRI
11	Empang-Mata	Perintis/Angdes
12	SP I-Empang	Perintis/Angdes
13	Empang-Plampang	Perintis/Angdes
14	SP I-Plampang	Perintis/Angdes

Selain trayek yang telah terlayani, di Kabupaten Sumbawa juga terdapat trayek yang belum terlayani, kebutuhan trayek diperlukan untuk menunjang konektivitas dalam rangka distribusi barang/jasa dan perpindahan orang.

Tabel 2.11

Daftar trayek yang belum terlayani

NO	JARINGAN TRAYEK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Sumbawa-Surabaya	AKAP
2	Sumbawa-Malang	AKAP
3	Sumbawa-Yogyakarta	AKAP
4	Sumbawa-Jakarta	AKAP

NO	JARINGAN TRAYEK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5	Mata-Kwangko	Perintis/Angdes
6	Mata-Pidang	Perintis/Angdes
7	Pidang-Kwangko	Perintis/Angdes
8	Empang-Kwangko	Perintis/Angdes

2. Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan

1. Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/ kota Disamping transportasi angkutan umum, secara geografis Kabupaten Sumbawa juga merupakan Kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, sehingga terdapat wilayah administrasi pemerintahan di beberapa pulau kecil dimaksud dengan penduduk yang mengandalkan transportasi perairan dalam kegiatan distribusi barang dan jasa.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang Perhubungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan sektor perhubungan laut merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sub urusan pelayaran di daerah Kabupaten/Kota yang secara umum terdiri dari kewenangan penertiban ijin, penetapan tarif, dan pembangunan /pengoperasian fasilitas pelabuhan di perairan lokal.

1.1. Pelabuhan Badas

Pelabuhan laut yang dioperasikan di kabupaten Sumbawa adalah Pelabuhan Badas terletak di Kecamatan Labuhan Badas, ± 15 Km dari pusat kota Sumbawa Besar. Pelabuhan Badas adalah pelabuhan komersil yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III dan otoritas kesyahbandaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Badas ditetapkan dalam kategori Kelas V dan di pimpin oleh seorang Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dengan tugas pokok : "Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan". Dari segi Operasional, Pelabuhan Badas merupakan pintu gerbang utama perekonomian pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikunjungi oleh kapal-kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Nusantara untuk muatan antar Pulau dan pelayaran khusus (suplay stok BBM Pertamina).

Aktivitas pelabuhan Badas sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Sumbawa, antara lain tampak dari perpindahan orang dan barang/jasa di pelabuhan Rakyat dan Pelabuhan Nusantara.

1.2. Dermaga Rakyat

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga Rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil dan terisolasi.

- Pembangunan dermaga rakyat di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan pada Tahun 2017, berlokasi di Pulau Moyo tepatnya di Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas (dermaga Sebotok). Dermaga Sebotok dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi TA. 2017
- Pembangunan dermaga rakyat Bugis Medang, berlokasi di Desa Bugis Medang Kec. Labuhan Badas dilaksanakan Tahun 2019

menggunakan dana APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi TA. 2019.

1.3 Tambatan Perahu

Tambatan perahu adalah suatu pangkalan tempat mengikat/menambat perahu saat berlabuh, sekaligus berfungsi sebagai tempat menunggu bagi penumpang dan menimbun barang sementara.

Tambatan perahu di Kabupaten Sumbawa dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Sumbawa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Daerah Tertinggal RI (KPDT) selama kurun 2013-2015.

Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu merupakan pelabuhan atau lintas penyeberangan Non Komersil milik Pemerintah kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.12
**Lintas Penyeberangan Non Komersil
(Pelabuhan Pengumpan Lokal) di Kabupaten Sumbawa**

NO.	KECAMATAN	LOKASI	UNIT	TAHUN
1	2	3	4	5
Dermaga				
1.	Kec. Lab. Badas	Pulau Moyo Desa Labuhan Aji	1	N/A Tahun 2022 dilakukan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Pulau Moyo Desa Labuhan Aji
2.	Kec. Lab. Badas	Pulau Moyo Desa Sebotok	1	2017
3.	Kec. Lab. Badas	Pulau Medang Desa Bugis Medang	1	2019
4.	Kec. Alas	Alas	1	N/A
Tambatan Perahu dan Border				
1.	Kec. Maronge	Labuhan Sangoro	1	2013
2.	Kec. Utan	Labuhan Padi	1	2013
3.	Kec. Tarano	Labuhan Tarujung	1	2014
4.	Kec. Alas Barat	Labuhan Mapin	1	2014

5.	Kec. Moyo Hilir	Labuhan Ijuk	1	2014
6.	Kec. Lab. Badas	Muara Kali Labuhan Sumbawa	1	N/A

Keterangan : Lintas Penyeberangan non komersial adalah pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial ditandai dengan adanya unit penyelenggara pelabuhan (PM.57 Tahun 2020). Untuk pelabuhan pengumpulan lokal unit penyelenggara pelabuhan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, secara garis besar dipedomani dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menjadi sinkron dan atau selaras dengan tugas fungsi Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan RI. Beberapa hal terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dewasa ini antara lain :

1. Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa secara umum memenuhi target sasaran yang ditetapkan yaitu ; terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan, Tersedianya Sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar teknis kebijakan transportasi, dan tersedianya regulasi/ Kebijakan teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan serta pembangunan infrastruktur perhubungan. Hal yang harus menjadi perhatian adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai hal- hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat dunia usaha dan pengembang dalam rangka mendukung terciptanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang aman, tertib dan berkeselamatan
2. Ketentuan tentang retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang menurut UU No.1 Tahun 2022 sudah tidak dapat dipungut lagi akan

mempengaruhi sumber PAD di Kabupaten Sumbawa.

3. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
 - a. Mengingat belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Transportasi dan Angkutan Jalan (RIJTJ) dan TATRALOK, Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa belum mempunyai landasan hukum menentukan titik simpul perpindahan orang/barang sebagai dasar pembangunan Terminal Angkutan Umum Type C sebagaimana kebutuhan masyarakat. Disamping itu pembangunan infrastruktur baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta di Kabupaten Sumbawa belum dilengkapi dengan persyaratan dokumen ANDALALIN (analisis dampak lalu lintas), mengingat pembangunan infrastruktur gedung misalnya akan berdampak pada lalu lintas.
 - b. Sehubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas keselamatan seperti perlengkapan jalan, dilaksanakan secara bertahap hal ini mengindikasikan masih banyaknya kebutuhan yang belum dapat terpenuhi terutama perlengkapan jalan.
4. Pencapaian visi dan misi 3 kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat terlaksana sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam dokumen rancana strategis (jangka menengah).
5. Berdasarkan poin di atas, maka rencana kerja Tahun 2023 difokuskan untuk mengoptimalkan pencapaian 2 sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran strategis yang bersifat mendukung (rutin), dan 1 (satu) sasaran strategis merupakan tolok ukur keberhasilan atau kinerja pelayanan (indikator kinerja utama) hal ini dimaksudkan sekaligus sebagai upaya mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan tugas dan fungsi serta memenuhi tahapan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis (dokumen jangka menengah) yaitu melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026, perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sesuai tema RKPD Tahun 2025 yaitu "Pemerataan Pembangunan, Pengembangan Investasi Produk Unggulan serta Penguatan Sistem Inovasi Daerah menuju Sumbawa Hebat Bermartabat. Secara umum rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tidak berbeda atau sesuai dengan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.13
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Sumbawa**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib					Urusan Wajib					
	Bidang Urusan Perhubungan					Bidang Urusan Perhubungan					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota					
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa		1 Dok	16.524.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa		1 Dok	16.524.900	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	3.309.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	3.309.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	1.477.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	1.477.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	4.281.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	4.281.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	2.679.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa		1 dok	2.679.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumba wa		2 lap	1.535.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumba wa		2 lap	1.535.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa		1 lap	6.067.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa		1 lap	6.067.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumba wa		53 org	4.550.776.583	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumba wa		53 org	4.550.776.583	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumba wa		3 lap	108.101.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumba wa		3 lap	108.101.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sumba wa		1 lap	2.175.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sumba wa		1 lap	2.175.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. sumba wa		1 lap	2.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. sumba wa		1 lap	2.520.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Kab. sumba wa		3 lap	1.005.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Kab. sumba wa		3 lap	1.005.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	an/Semesteran SKPD					n/Semesteran SKPD					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Sumba wa		4 paket	2.288.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumba wa		4 paket	2.288.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa		2 paket	59.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa		2 paket	59.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumba wa		24 lap	67.862.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumba wa		24 lap	67.862.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumba wa		6 dok	1.055.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumba wa		6 dok	1.055.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Urusan Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumba wa		1000 lap	49.625.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumba wa		1000 lap	49.625.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumba wa		4 lap	46.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumba wa		4 lap	46.200.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa		12 lap	3.448.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa		12 lap	3.448.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumba wa		3 lap	58.275.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumba wa		3 lap	58.275.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kab. Sumba		10 unit	6.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kab. Sumba		10 unit	6.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	wa				Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	wa				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumba wa		4 unit	101.121.350	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumba wa		4 unit	101.121.350	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota	Kab. Sumba wa		25 unit	370.157.650	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota	Kab. Sumba wa		25 unit	537.872.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Kab. Sumba wa		1 unit	44.980.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Kab. Sumba wa		1 unit	44.980.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Jalan					Jalan					
	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C					Pengelolaan Terminal Penumpang Type C					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Sumba wa		1 dok	5.195.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Sumba wa		1 dok	5.195.500	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab./Kota	Kab. Sumba wa		1 dok	226.653.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab./Kota	Kab. Sumba wa	1 dok		226.653.000	
	Pengujian					Pengujian					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Berkala Kendaraan Bermotor					Berkala Kendaraan Bermotor					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PKB		5.614 unit	61.275.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PKB	5.614 unit		61.275.000	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PKB		1 unit	52.400.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PKB		1 unit	52.400.000	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Kab. Sumba wa		1 lap	465.498.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Kab. Sumba wa		1 lap	465.498.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota					Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota					
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota					
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kab./kota	Kab. Sumba wa		1 dok	750.000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kab./kota	Kab. Sumba wa		1 dok	750.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah					Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kab./Kota dalam1 (satu) Daerah Kab./Kota					Kab./Kota dalam1 (satu) Daerah Kab./Kota					
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kab./Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sumba wa		342 lap	815.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kab./Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Sumba wa		342 lap	815.000	
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayanai Trayek Serta angkutan					Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayanai Trayek Serta angkutan Perkotaan dan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota					Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota					
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Kab. Sumba wa		1 dok	6.187.000	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Kab. Sumba wa		1 dok	6.187.000	
	Program Pengelolaan Pelayaran					Program Pengelolaan Pelayaran					
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani					Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota					Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota					
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa		1 dok	88.995.000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa		1 dok	88.995.000	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			1 unit	200.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			1 Unit	200.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui forum Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025 dan forum Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Forum musrenbang menghasilkan usulan-usulan yang dihimpun dari tingkat desa sampai dengan kecamatan demikian juga reses anggota DPRD Kab. Sumbawa dilaksanakan di DAPIL. Daftar usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
 Tahun 2025**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Usulan pada Musrenbang				

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan atau agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu:

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi. Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023 memuat misi untuk :

Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah

Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi

Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah

Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi

Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Misi yang diusung timbul dari hasil elaborasi permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan dan mempertimbangan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Berikut ini keterkaitan misi pembangunan yang diusung dengan isu strategis dan perencanaan lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2025 adalah mengoptimalkan kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi berupa optimalisasi pencapaian sasaran strategis dengan tolok ukur indikator kinerja utama dan target Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tahapan pelaksanaan rencana jangka menengah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam rencana kerja ini, direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi 3 (ketiga) kepala daerah/wakil kepala daerah periode 2016-2021. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari program dan kegiatan prioritas serta program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang bersifat prioritas sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas TA. 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	2
B	Program/Kegiatan terkait Sasaran Strategis 2
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	2
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab./Kota
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
8	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kab./Kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
9	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kab./Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
10	Penyediaan Data dan Informasi tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
III	Program Pengelolaan Pelayaran
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
11	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan program rutin yang dilaksanakan terdiri dari :
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota, dengan kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	2
A.	Program/Kegiatan terkait Sasaran Strategis 1
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Tahun 2025 :

Tabel 4.4a
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	2
A.	Program/Kegiatan terkait Sasaran Strategis 1
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B.	Program/Kegiatan terkait Sasaran Strategis 2
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	2
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab./Kota
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota
8	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kab./Kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
9	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kab./Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
10	Penyediaan Data dan Informasi tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota
II	Program Pengelolaan Pelayaran
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
11	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel. 4.4b
Program dan Kegiatan Berdasarkan Perencanaan Teknokratik
Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota	Dana yang dibutuhkan				
1	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota			455.000.000	DAU	
	a. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			13.220.000	DAU	
	b. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas		20 buah	32.000.000	DAU	
	c. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas untuk Kabupaten Layak Anak (KLA)		25 buah	40.000.000	DAU	
	d. Pengadaan dan pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell)		2 unit	60.000.000	DAU	
	e. Pengadaan dan Pemasangan Guardrail		150 Meter	300.000.000	DAU	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
	f. Halte		1 Unit	50.000.000	DAU	
	g. Perencanaan			10.000.000	DAU	
	h. Pengawasan			10.500.000	DAU	
2	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
	a. Peralatan Penunjang Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		-	-	DAU	
B	PROGRAM PELAYARAN					
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan			200.000.000	DAU	
	a. Pembangunan Ruang tunggu pelabuhan pulau moyo		1 paket	200.000.000	DAU	

Tabel 4.4c
REKAPILTULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota				
1	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab./Kota		25 unit	370.157.650	DAU
2	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		1 unit	44.980.000	DAU
	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C				
3	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		1 unit	5.195.500	DAU
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
4	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas		1 dok	226.653.000	DAU

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	Parkir Kewenangan Kab./Kota				
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
5	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 unit	61.275.000	DAU
6	- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		5.614 unit	52.400.000	DAU
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
7	- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota		1 lap	465.498.000	DAU
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota				
8	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan		1 dok	750.000	DAU

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	Trayek Pedesaan Kewenangan Kab./Kota				
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota				
9	- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kab./Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		342 lap	815.000	DAU
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota				
10	- Penyediaan Data dan Informasi tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan		1 dok	6.187.000	DAU

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota				
B	Program Pengelolaan Pelayaran				
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
11	- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 dok	88.995.000	DAU

BAB V.

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perrhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan teknis satu tahunan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen rencana kerja dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA dan DPA dalam rangka pelaksanaan urusan wajib bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) merupakan kerangka program dan kegiatan yang memberikan informasi awal tentang apa yang akan dilakukan/dikerjakan pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja (RENJA) dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya apabila terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi dalam rentang waktu dimaksud yang mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA).

Akhir kata semoga apa yang tertuang dalam rencana kerja (RENJA) betul-betul merupakan hasil analisis kebutuhan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang baik, khususnya pelayanan publik di bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa.